***Mata Kuliah : Analisa Politik Luar Negeri***

***Dosen : Andrias Darmayadi, Ph.D***

**KRITERIA UKURAN KESIAPAN SUATU NEGARA DALAM MELAKSANAKAN POLITIK LUAR NEGERINYA**

I. **Kesiapan Politis**, meliputi :

1. Diukur dari kemampuan suatu negara untuk membuat suatu perjanjian dengan negara-negara tetangganya. Yang di maksudkan selain untuk menggalang kerjasama juga untuk menangkal dan bahkan mengisolasi musuh-musuh potensial;
2. Diukur dari kemampuan untuk mendayagunakan situasi atau kecenderungan internasional untuk menunjang atau memberi legitimasi (terutama untuk masalah-masalah kontroversial bagi kebijakan-kebijakan Polugrinya);
3. Kemampuan untuk membuat suatu kerangka kebijakan yang mencakup berbagai kemungkinan, unsur pendukung, kendala dan sekaligus kesempatan;
4. Kemampuan menghindarkan, melalui berbagai negosiasi/perundingan, bentrokan-bentrokan secara secara langsung dengan kepentingan negara lain terutama dengan kepentingan negara-negara besar yang dapat memungkinkan munculnya konflik terbuka (perang);
5. Kemampuan untuk menggalang/memprakarsai wadah keamanan kolektif.

II. **Kesiapan Ekonomis**, meliputi ;

1. Kemampuan untuk mendayagunakan atau memaksimalkan nilai dari sumber-sumber daya yang di milikinya. Atau apabila negara tersebut miskin SDA, ia harus mempunyai akses yang kuat untuk menyediakan berbagai bahan mentah yang bisa menunjang keunggulan-keunggulan ekonominya;
2. Kemampuan yang diukur dari kapasitas industrialisasinya;
3. Tingkat teknologi serta tingkat pemahaman secara administratif, secara industrial dan secara scientific dari pelbagai hal yang bisa menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kemampuan militer;
4. Kapasitas finansial dan tingkat kesejahteraan nasional yang di asumsikan sebagai motor atau pun penghambat dari berbagai kebijakan yang telah di tetapkan.

III. **Kemampuan Militer dan Kesiapan untuk menjamin Hankam** ;

1. Kemampuan untuk merencanakan suatu strategi jangka panjang yang mencakup upaya pertahanan dan ekspansi yang di dasarkan pada studi/penelaahan atas berbagai kemungkinan dalam percaturan internasional yang berlaku serta antisipasi terhadap kemungkinan serangan dari musuh yang tak di perkirakan;
2. Kemampuan untuk menyelenggarakan organisasi pertahanan, kemiliteran yang memadai dan di lengkapi dengan berbagai lembaga pelatihan yang dapat mengantisipasi situasi di darat, udara dan laut;
3. Kemampuan untuk membuat perencanaan dan koordinasi penempatan personal secara tepat dan menyediakan fasilitas yang memadai untuk menghadapi perang sewaktu-waktu;
4. Kemampuan untuk mendistribusikan dan mensuplai penunjang logistik.

**Catatan:**

Satu faktor yang sangat penting dari kesiapan tadi adalah justru kesiapan psikologis baik secara kolektif maupun secara individual.

**INSTRUMEN KONKRET BAGI PELAKSANAAN POLUGRI**

Ketika pembuat kebijakan telah menetapkan suatu kebijakan, ia harus menentukan sarana yang paling tepat untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Karena terdapat banyak jenis instrumen kebijakan yang dapat di pergunakan, adalah tak mungkin mendiskusikan masing-masing instrumen tersebut secara terpisah.

Para pembuat kebijakan sering membagi instrumen-instrumen pelaksanaan polugri ke dalam dua kategori:

1. Yang relatif bersifat nyata (seperti ekonomi dan aktivitas-aktivitas militer);
2. Yang lebih bersifat tidak nyata (seperti komunikasi dan negosiasi).

# Ekonomi Sebagai Instrumen Pelaksanaan Polugri

Instrumen ekonomi, ada dua jenis:

1. **Kebijakan Perdagangan.**

Perdagangan Internasional adalah satu faktor penting yang utama dalam perhitungan-perhitungan para pembuat kebijakan. Volume barang-barang, jasa-jasa, sumber-sumber kekayaan alam dan pertukaran modal secara internasional terus tumbuh, dan dengan demikian nyatalah bahwa masalah-masalah ekonomi menimbulkan implikasi yang luas. Karena adanya saling ketergantungan ekonomi antar negara dan berbagai kerawanannya, terdapat sangat banyak situasi yang mengandung banyak kesempatan untuk menggunakan pengaruh.

Kebijakan perdagangan ini meliputi:

1. Bersifat Manipulasi Perdagangan

a. Bea, adalah pajak yang dibebankan atas barang-barang buatan luar negeri yang di perdagangkan di dalam negeri. Seringkali bea atas barang-barang buatan luar negeri di terapkan karena alasan-alasan domestik:

- untuk melindungi produksi dalam negeri dari kompetisi asing;

- untuk menurunkan tingkat konsumsi atas barang-barang impor;

- untuk meningkatkan penghasilan pajak tambahan negara.

b. Kuota, termasuk jenis hambatan kuantitatif/hambatan non-tarif, adalah pembatasan jumlah barang-barang impor oleh para pembuat kebijakan di dalam negeri. Dalam hal kuota, produser/pengusaha asing dapat menjual barang-barangnya dengan pengaturan harga sendiri akan tetapi jumlahnya dibatasi.

c. Boikot, adalah penolakan atas barang-barang impor. Dapat bersifat selektif, yaitu hanya terhadap komoditi-komoditi teretentu saja, dan dapat pula bersifat umum, suatu penolakan membeli berbagai komoditi yang di hasilkan oleh suatu negara.

d. Embargo, adalah penolakan oleh suatu negara untuk menjual barang-barangnya ke negara lain. Embargo juga dapat bersifat khusus atau umum;

1. Tidak Secara Langsung Bersifat Manipulasi Perdagangan

e. Manipulasi bea pertukaran mata uang. Agar negara X dapat membeli barang-barang dari negara Y, ia memerlukan mata uang yang sudah di konversi ke dalam mata uang negara Y. Beberapa rasio pertukaran mata uang sudah di tetapkan. Jika suatu negara mampu memanipulasi rasio ini, ia dapat mempengaruhi hubungan perdagangan antara kedua negara tersebut. Tujuan manipulasi bea pertukaran mata uang ini adalah untuk menurunkan impor dan meningkatkan ekspor. Dengan tingginya rasio mata uang dalam negeri sehingga dapat membeli mata uang asing lebih banyak, maka (bea) impor akan lebih mahal dan ekspor akan lebih murah.

f. Pre-emptive buying. Hal ini meliputi pembelian barang-barang atau komoditi tertentu sedemikian rupa hingga the target of the activity will not have them available. Selama perang dunia II, negara-negara sekutu sering mengalahkan negara-negara poros dalam menawar barang yang hendak di ekspor oleh negara-negara Netral ke salah satu blok.

g. Dumping. Hal ini meliputi penjualan barang-barang dengan menekan harga secara sengaja untuk menurunkan harga barang-barang tertentu di pasaran dunia dengan maksud memberi keuntungan yang kecil pada negara-negara lain yang memperdagangkan barang-barang tersebut di dalam negerinya. Dumping dapat memberi pengaruh rintangan bagi perdagangan negara-negara yang terkena dumping.

# Bantuan Luar Negeri

1. Bantuan Pembangunan (*Development Assistence*). Program-program bantuan pembangunan meliputi bantuan keuangan secara cash dengan maksud agar negara penerima dapat menghimpun dana yang di butuhkan untuk mempercepat pembangunannya, atau berupa program pemberian kredit lunak seperti kredit jangka panjang dengan bunga rendah.
2. Bantuan Militer (*Military Assistance*). Yaitu penyediaan atau pemberian dana keuangan dan material untuk keperluan-keperluan militer (termasuk bantuan untuk program-program dukungan pertahanan). Program bantuan militer dianggap bagian dari bantuan luar negeri sebab kenyataan bahwa militer negara penerima bantuan akan mampu terbantu mengalihkan sumber daya-sumber dayanya sendiri untuk memperluas investasi dalam proyek-proyek ekonominya.
3. Bantuan Teknis (*Technical Assistance*). Yaitu tranfer ilmu pengetahuan dan kecakapan dari satu negara ke negara lainnya.

**Sasaran Pemberian Bantuan Luar Negeri Paling tidak adalah:**

1. *To assist economic development of the recipient state*. Dengan suatu keyakinan bahwa semua umat manusia berhak mendapat standar hidup minimum tertentu dan mereka (negara-negara) yang beruntung berkewajiban untuk membantu mereka;
2. *To achieve sufficient gratitude for the provider state*. Negara pemberi bantuan mengharapkan negara penerima bantuan, sebagai balasan atas bantuan yang mereka terima, harus memberi rasa terimakasih yang cukup paling tidak sikap simpatik terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan luar negeri negara pemberi bantuan dan mungkin memodifikasi sikap dan perilaku mereka sesuai dengan keinginan negara pemberi bantuan;
3. *To provide support for the recipient state*. Dalam hal ini, para pembuat kebijakan negara pemberi bantuan tidak bermaksud agar negara penerima memodifikasi kebijaksanaan luar negeri mereka. Jika kebijaksanaan-kebijaksanaan dan sasaran-sasaran luar negeri negara penerima bantuan tidak sesuai dengan keinginan negara pemberi bantuan, paling tidak masih dapat ditoleransi.